

***CO-PRODUCTION IN THE GOVERNANCE OF MARGOMULYO VILLAGE
BASED ON LOCAL WISDOM (A CASE STUDY OF THE SAMIN COMMUNITY)***

***CO-PRODUCTION DALAM TATA KELOLA DESA MARGOMULYO YANG
BERBASIS KEARIFAN LOKAL (STUDI KASUS PADA MASYARAKAT
SAMIN)***

**Sulikah Asmorowati*¹, Jusuf Irianto¹, Dian Yulie Reindrawati¹,
Gabby Julia Prasistya¹, Feny Dwintania¹**

*¹ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga

*e-mail: sulikah.asmorowati@fisip.unair.ac.id

Abstract

The village government is expected to be able to have a significant influence on development in various fields. However, this interest often hinders village governance implementation due to the insufficient institutional capacity of the village. This situation can have far-reaching effects on socio-economic issues within the community. Therefore, institutional capacity and the development of co-production for village governments and communities are key elements in addressing issues in the village. In the governance management process, Margomulyo village officials still require development in various aspects, including governance knowledge and adopting information technology in bureaucracy. This community service activity provides training and mentoring to Margomulyo village government officials to enhance their capacity. The method employed in this activity involves delivering lectures, providing modules, and offering follow-up mentoring. The outcomes of this community service include an improvement in the knowledge of village officials regarding capacity building and co-production, as evidenced by post-test scores, as well as the enhancement of the village website and the prototype of the Saminku application.

Keywords: *Co-production; Local Wisdom; Samin Community; Capacity Building; Digital Governance.*

Abstrak

Pemerintah desa diharapkan dapat mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Pembangunan di berbagai bidang. Kepentingan tersebut sering menjadi hambatan dalam pelaksanaan pemerintahan desa karena desa tidak memiliki kapasitas kelembagaan yang memadai. Keadaan tersebut dapat memberikan pengaruh yang meluas terhadap permasalahan dalam bidang sosial ekonomi di Masyarakat suatu desa. Oleh karena itu, kapasitas kelembagaan dan pengembangan co-production bagi pemerintah desa dan masyarakat merupakan salah satu kunci untuk mengatasi permasalahan yang ada di desa. Dalam proses pengelolaan pemerintahan, perangkat desa Margomulyo masih membutuhkan banyak aspek pengembangan meliputi pengetahuan pemerintahan dan pengembangan teknologi informasi birokrasi. Kegiatan Pengmas ini memberikan pelatihan dan pendampingan kepada aparatur pemerintah Desa Margomulyo untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah dengan memberikan materi melalui ceramah, pemberian modul, serta pendampingan sebagai follow-up kegiatan. Hasil yang dicapai dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah peningkatan pengetahuan aparatur

Received 12 December 2023; Received in revised form 3 March 2024; Accepted 6 April 2024;
Available online 15 June 2024.

 [10.20473/jlm.v8i1.2024.257-269](https://doi.org/10.20473/jlm.v8i1.2024.257-269)



Copyright: © by the author(s) Open access under CC BY-SA license
[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

desa tentang capacity building dan co-production dibuktikan nilai post test, serta perbaikan website desa dan prototype aplikasi Saminku.

Kata kunci: Co-production; Kearifan Lokal; Pengembangan Kapasitas; Masyarakat Samin; Digital Governance.

PENDAHULUAN

Tata kelola mengacu pada proses pembuatan dan penegakan keputusan dalam suatu organisasi atau masyarakat. Tata kelola meliputi proses pengambilan keputusan, penetapan aturan, dan mekanisme penegakan hukum untuk memandu berfungsinya suatu organisasi atau masyarakat. Tata kelola pemerintahan harus berorientasi kepada perwujudan *good governance*. *Good Governance* menjadi realitas yang hidup dalam konteks pemerintahan, pembangunan, dan birokrasi pemerintahan yang berperan sebagai *enabling* dan *empowering* dalam kehidupan masyarakat Indonesia (Kardos, 2012; Rakhmat, 2018).

Tata kelola pemerintahan Indonesia telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pemerintahan sesuai dengan otonomi daerahnya (Batubara, 2019). Selain itu, desa juga memiliki otonomi khusus untuk mengelola wilayahnya. Dewasa ini, perubahan terjadi secara cepat dan penuh ketidakpastian. Tata kelola di sektor pemerintahan memiliki tantangan dalam menghadapi perubahan yang terjadi secara cepat (Bhargava, 2015; Marzuki, 2016; Setyadiharja et al., 2017). Untuk menjawab tantangan tersebut, salah satu alat yang digunakan dalam pemerintahan yaitu tata kelola digital (*digital governance*). Indonesia telah menetapkan tujuan untuk memiliki pemerintahan yang sepenuhnya digital pada tahun 2025 melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, yang menargetkan tata kelola inisiatif *e-Government*. Aturan tersebut mencakup pengembangan portal nasional terintegrasi, pengelolaan data, keamanan informasi, dan manajemen risiko. Negara ini mengalami kemajuan dalam menghilangkan silo dan melakukan digitalisasi lembaga-lembaga pemerintah daerah, dan telah memperkuat layanan dan infrastruktur *e-Government* sejak tahun 2020 (Saputro & Safriansyah, 2021). Pusat Data Nasional diharapkan menjadi pilar utama upaya pemerintah digital di negara ini, membantu lembaga-lembaga mengatasi silo dan memenuhi tujuan e-pemerintah.

Desa merupakan bagian dari pemerintah yang memiliki otonomi khusus Penyelenggaraan Otonomi Desa diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada desa untuk mengelola urusan dan sumber dayanya sendiri, termasuk kewenangan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengelola program pembangunannya sendiri. Penyelenggaraan Otonomi Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa, meningkatkan kualitas sumber daya manusia di desa, dan meningkatkan ketahanan pangan di desa (Oroh, 2014). Undang-undang ini juga mengamatkan pembentukan pemerintahan desa yang bertanggung jawab mengelola urusan dan sumber daya desa. Pemerintahan desa terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, dan Dewan desa. Pemerintah desa diharapkan dapat mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Pembangunan di berbagai bidang. Kepentingan tersebut acapkali menjadi hambatan dalam pelaksanaan pemerintahan desa karena suatu desa tidak memiliki kapasitas kelembagaan yang memadai. Keadaan tersebut dapat memberikan pengaruh yang meluas terhadap permasalahan dalam bidang sosial ekonomi di Masyarakat suatu desa. Oleh karena itu,

kekuatan atau kapasitas kelembagaan bagi pemerintah desa merupakan salah satu kunci yang menjadi pijakan pelaksanaan pemerintahan.

Samin merupakan sebutan untuk Masyarakat di Dusun Jepang Margomulyo, Bojonegoro yang merupakan keturunan dari Samin Surosentiko. Dalam proses pengelolaan pemerintahan, perangkat desa Margomulyo masih membutuhkan banyak aspek pengembangan meliputi pengetahuan pemerintahan dan pengembangan teknologi informasi birokrasi. Permasalahan tersebut meliputi kurangnya pengetahuan berbasis manajemen birokrasi, minimnya pengetahuan tentang pengembangan eksistensi desa melalui *platform digital*, kurangnya pemberdayaan dan peningkatan peluang pengembangan ekonomi kerakyatan, serta proyeksi program Pembangunan desa yang masih belum tersusun secara proyekatif dan implementatif. Permasalahan kurangnya pengetahuan berbasis manajemen birokrasi disebabkan oleh kurangnya pengetahuan perangkat desa mengenai tata kelola birokrasi yang sesungguhnya. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Desa Margomulyo, bahwa mayoritas perangkat desa merupakan lulusan SMA/SMK sehingga pengetahuan akan tata kelola Masyarakat dirasa masih minim. Permasalahan kedua yaitu minimnya pengetahuan tentang pengembangan eksistensi desa melalui *platform digital*. Dalam proses pengelolaan pemerintah, perangkat Desa Margomulyo memiliki *website* yang cenderung tidak pernah diperbarui dikarenakan minimnya pengetahuan tentang manajemen dan operasional *website*. Permasalahan selanjutnya yaitu kurangnya pemberdayaan dan peningkatan peluang pengembangan ekonomi kerakyatan di Desa Margomulyo seperti sektor UMKM, warisan budaya, maupun pengelolaan aset desanya. Permasalahan yang terakhir yaitu proyeksi program Pembangunan desa yang masih belum tersusun secara proyekatif dan implementatif, sehingga visi Pembangunan desa dalam jangka menengah maupun jangka panjang belum terkonsep dengan baik.

Co-Production perlu diimplementasikan untuk menjawab permasalahan tata kelola Pemerintahan Desa Samin. *Co-Production* merupakan konsep kunci dalam pengembangan layanan publik dan memiliki potensi untuk memberikan kontribusi penting terhadap semua tantangan besar yang dihadapi dalam penyediaan layanan sosial (Chambers et al., 2021; Osborne et al., 2016). Konsep *Co-Production* mendapatkan perhatian dan semakin relevan karena memiliki potensi untuk mengatasi berbagai faktor yang dapat menghambat efektivitas penyediaan layanan publik. Seperti yang diungkapkan oleh Marshall et al. (2004, 232), ‘poin mendasarnya adalah bahwa tanpa partisipasi aktif Masyarakat, kapasitas pemerintah untuk menyediakan barang dan jasa sangat berkurang’. *Co-production* yang efektif didasarkan pada prinsip aksesibilitas, keragaman, kesetaraan, timbal balik, dan mutualisme (Farr, 2018; Heaton et al., 2016; Pettican et al., 2023; Verschuere et al., 2012). Dalam *Co-production*, harus ada hubungan yang benar-benar setara dan timbal balik antara pegawai/staf dan orang-orang yang memiliki pengalaman di suatu bidang (Chohan, 2020). *Co-production* melibatkan orang-orang yang menggunakan layanan yang diajak berkonsultasi, diikutsertakan, dan bekerja sama dari awal hingga akhir proyek apapun yang mempengaruhi mereka (Farr, 2018; Loeffler & Bovaird, 2021; Van Eijk & Steen, 2015). Pendekatan ini berbasis nilai dan dibangun berdasarkan prinsip bahwa mereka yang terkena dampak suatu layanan adalah pihak yang paling tepat untuk membantu merancang layanan tersebut (Fung, 2015; Ostrom et al., 2015; Turnhout et al., 2020). Ada berbagai titik awal untuk mengimplementasikan *co-production*. Hal ini mencakup pendekatan “aset” berbasis komunitas, pendekatan yang diprakarsai oleh organisasi publik, dan pendekatan yang

dipimpin oleh masyarakat yang menggunakan layanan (Marshall et al., 2019). Serangkaian prinsip inti yang mencirikan apa yang disebut sebagai *co-production* yang “transformatif” antara lain, 1) Menyadari bahwa setiap orang mempunyai aset dan kekuatan; 2) Membangun hubungan yang saling menguntungkan dan timbal balik dimana semua pihak diakui memiliki keahlian (tidak terkecuali mereka yang memiliki pengalaman hidup); Dan 3) Membentuk jaringan di berbagai komunitas kepentingan yang berupaya untuk mengkatalisis perubahan (Lewis et al., 2017)

Proses Pengabdian Masyarakat ini, dilakukan dengan tujuan untuk mengakselerasi pelaksanaan dari *Sustainable Development Goals* (SDG’s) pada poin ke 10, 11, dan 16 yaitu *Reduce Inequalities*; *Sustainable Cities and Communities*; dan *Strong Institution* sebagai upaya eskalasi kapasitas kelembagaan Desa Margomulyo dan Masyarakat Desa Margomulyo agar dapat bertahan di era disrupsi *post-pandemic*. Pelaksanaan program pengabdian Masyarakat menggunakan konsep *endogenous development* dan *smart village* yang merupakan sebuah proses pengembangan kapasitas dimana target sasaran yang dituju adalah Pemerintah Desa sebagai pihak yang berperan besar untuk mewujudkan tata kelola desa yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Dengan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*) berdasarkan *New Public Governance* untuk mewujudkan ‘Desa Wisata Samin Smart’.

METODE PENGABDIAN MASYARAKAT

Kegiatan pengmas dilaksanakan di Balai Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro, pada tanggal 18 Desember 2023. Untuk mencapai tujuan pengabdian masyarakat, metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini adalah sebagai berikut:

Pemberian Materi Melalui Ceramah

Materi pelatihan atau ceramah ini meliputi penjelasan mengenai tujuan dan materi pengabdian, implementasi Co-production dalam tata kelola pemerintah menuju *good governance*, *capacity building*, serta implementasi *co-production* dan *capacity building* apabila dikaitkan dengan potensi sumber daya manusia dan alam Desa Margomulyo. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 18 September 2023 di Balai Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro pukul 11.00-13.00 WIB. Sasaran dalam kegiatan ini adalah Kepala Desa beserta jajaran pemerintah desa, kepala dusun, ketua PKK beserta anggota, dan perwakilan sesepuh dari Masyarakat Samin. Materi disampaikan secara terstruktur dan disampaikan dengan kapasitas aparatur Pemerintah Desa Margomulyo yang menjadi objek kegiatan pengabdian masyarakat ini, sehingga materi yang disampaikan lebih mudah diserap dan dipahami oleh kelompok sasaran atau mitra dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Untuk mengukur keberhasilan program, dengan memberikan *pre-test* dan *post-test* kepada Aparatur Desa Margomulyo untuk menilai pengetahuan dasar peserta sebelum dan sesudah pemberian materi.

Pembuatan dan Pemberian Modul

Untuk mendukung kegiatan pengabdian masyarakat ini, maka dibuatkan modul *co-production* dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur desa yang selanjutnya modul tersebut diberikan kepada setiap peserta yang hadir dalam pengabdian masyarakat ini.

Modul ini bertujuan agar peserta lebih mudah memahami mengenai *co-production* dan pengembangan kapasitas sehingga dapat menerapkannya dalam tata kelola pemerintah Desa Margomulyo.

Pendampingan Sebagai Follow-up Program

Untuk mencapai pelaksanaan dua metode ini, maka dilakukan perencanaan kegiatan, yaitu: 1) Koordinasi dengan tim pelaksana (dosen dan anggota) serta tim pendukung kegiatan pengabdian masyarakat yang terdiri dari empat mahasiswa aktif Program Studi Administrasi Publik; 2) Koordinasi dengan mitra pemberdayaan masyarakat, dalam hal ini adalah Kepala Desa Margomulyo untuk menentukan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat; 3) Mengurus perizinan ke mitra, yaitu Kepala Desa Margomulyo; 4) Koordinasi dengan Kepala Desa Margomulyo untuk persiapan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat, misalnya memperbanyak modul yang akan diberikan beserta ATK dan persiapan konsumsi yang akan diberikan pada saat kegiatan ceramah materi selesai dilakukan.

Keberhasilan pelaksanaan pengabdian masyarakat ini diukur dengan hasil nilai *pre-test* dan *post test* yang dikerjakan peserta untuk melihat pemahaman peserta terhadap materi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan level keberdayaan pemerintah Desa Margomulyo dengan cara sosialisasi kepada warga masyarakat dan pemerintah desa terkait dengan materi *Co-production* dan *Capacity Building*. Selain itu juga bertujuan untuk mewujudkan program Desa Wisata Samin Smart yang berbasis pada *Co-production*, kegiatan ini dilaksanakan dengan sosialisasi prototipe aplikasi SAMINKU.

Peserta

Kegiatan sosialisasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kapasitas pemerintah desa Margomulyo mengundang 30 orang yang terdiri dari Kepala Desa beserta jajaran pemerintah desa, kepala dusun, ketua PKK beserta anggota, dan perwakilan sesepuh dari Masyarakat Samin.



Gambar 1. *Peserta Sosialisasi Co-production.*

Peserta yang hadir sangat antusias mengikuti sosialisasi/ceramah yang diberikan oleh Ketua Pengusul dan tim pengabdian masyarakat di Balai Desa Margomulyo. Antusiasme tersebut dapat dilihat dari undangan yang menyimak dengan seksama materi terkait *Co-production* dan *Capacity Building* yang disampaikan.

Gambaran Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan sosialisasi ini memberikan pelatihan kepada peserta melalui ceramah, memberikan *pre-test* dan *post-test* kepada peserta, serta pemberian modul *Co-Production* pada Tata Kelola Pemerintah Desa Margomulyo Berbasis *Local Wisdom* Masyarakat Samin.



Gambar 2. Pelaksanaan sosialisasi/ceramah.

Pemberian ceramah dilakukan oleh Ketua Pengusul pengabdian masyarakat (Sulikah Asmorowati, S.Sos., M.DevSt., Ph.D) yang membahas secara umum tujuan dan materi pengabdian. Materi kedua dibawakan oleh narasumber Dwi Retno Ayu yang membahas tentang implementasi *Co-production* dalam tata kelola pemerintah menuju *good governance*. Materi ceramah kemudian dilanjutkan oleh narasumber lain yaitu Gabby Julia Prasistya yang membawakan materi berupa Pengembangan Kapasitas (*Capacity Building*). Terakhir materi disampaikan oleh Dr. Violeta Schubert dari Melbourne University sebagai mitra pengabdian masyarakat yang menyampaikan tentang implementasi *co-production* dan *capacity building* apabila dikaitkan dengan potensi sumber daya manusia dan alam desa Margomulyo. Kegiatan ceramah tersebut disampaikan dengan durasi dua jam di Balai Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro pukul 11.00-13.00 WIB. Peserta yang hadir dalam kegiatan sosialisasi akan diberikan modul tentang *Co-Production* pada Tata Kelola Pemerintah Desa Margomulyo Berbasis *Local Wisdom* Masyarakat Samin.

Pemberian materi *co-production* pada tata kelola pemerintah dimulai dengan diskusi singkat oleh peserta terkait pemahaman mereka tentang *co-production*. Dari hasil diskusi singkat tersebut didapat bahwa masih banyak anggota pemerintah Desa Margomulyo dan Ibu-ibu PKK tidak memahami apa itu *co-production*. Selanjutnya, ceramah tentang *co-production* berlangsung dengan baik. Narasumber menyampaikan pentingnya *co-production* dan apa saja elemen yang ada di dalamnya. Selain itu juga, narasumber mengaitkan berbagai faktor dalam konsep *co-production* dalam tata kelola pemerintah dengan mengilustrasikan pada contoh nyata. Akhir sesi ceramah pertama tentang *co-*

production ditanggapi meriah dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh peserta dan juga diskusi singkat terkait permasalahan desa yang penyelesaiannya dilakukan dengan menerapkan konsep *co-production* di dalamnya.

Materi kedua yang dibawakan oleh narasumber kedua tentang Pengembangan Kapasitas (*Capacity Building*) juga menarik perhatian peserta. Mekanisme pelaksanaan pemberian materi tentang pengembangan kapasitas tidak jauh beda dari materi yang pertama. Ceramah dibuka dengan diskusi kecil untuk melihat pemahaman peserta tentang pengembangan kapasitas. Hasil yang di dapat dari diskusi tersebut, peserta dalam hal ini pemerintah desa dan jajarannya sudah mulai mengerti tentang pengembangan kapasitas dan manfaat yang diperoleh apabila menerapkannya dalam pemerintahan. Pemberian ceramah dilanjut dengan penyampaian elemen-elemen pengembangan kapasitas, *core value*, dan proses atau tahapan dari pengembangan kapasitas beserta contohnya. Ceramah dilanjut dengan tanya jawab dan diskusi antara peserta dan narasumber. Materi terakhir yang dibawakan oleh narasumber ketiga (Dr. Violeta Schubert) membahas contoh langsung penerapan *co-production* dan pengembangan kapasitas pada tata kelola pemerintah. Materi disampaikan dengan bahasa inggris yang kemudian diterjemahkan ke Bahasa Indonesia agar mudah dipahami peserta. Meskipun terkendala dengan bahasa, peserta juga sangat antusias untuk mengutarakan pertanyaan dan bercerita singkat tentang permasalahan yang dihadapi



Gambar 3. Tanya jawab dan diskusi dengan peserta.

Peserta Pengabdian Masyarakat juga diberikan *pre-test* dan *post-test* untuk mengukur pengetahuan dasar peserta terkait dengan *capacity building* dan *co-production*. Hasil *pre-test* menunjukkan pengetahuan dasar peserta tentang *capacity building* dan *co-production* cukup baik, tetapi banyak peserta yang belum memahami tentang *co-production*. Setelah sosialisasi dilakukan, berdasarkan tabel 1, hasil *post-test* menunjukkan bahwa pemahaman peserta tentang *capacity building* dan *co-production* meningkat.

Tabel 1. Hasil Pre-test dan Post-Test Pengetahuan Co-Production dan Capacity Building.

No.	Bahasan	Pre-Test	Post-Test
1	Konsep Kerjasama pemerintah dengan Masyarakat	16	30
2	Definisi <i>co-production</i>	5	28
3	Tujuan utama <i>co-production</i>	7	30
4	Bagaimana <i>co-production</i> dapat memperkuat keterlibatan komunitas dalam pengambilan Keputusan	10	29
5	Peran Masyarakat dalam pelaksanaan <i>co-production</i>	8	30
6	Bagaimana <i>co-production</i> dapat memperkuat keterlibatan Masyarakat dalam pengambilan Keputusan	11	30
7	Bagaimana <i>co-production</i> dapat membantu mengatasi masalah ketidaksetaraan dalam akses pelayanan publik	15	30
8	Bagaimana <i>co-production</i> dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah	12	30
9	Mengapa <i>co-production</i> dapat membantu membangun rasa kepemilikan Masyarakat terhadap layanan publik	12	30
10	Peran <i>co-production</i> dalam tata kelola pemerintahan	8	30
11	Bagaimana <i>co-production</i> dapat membantu pemerintah dalam mengidentifikasi kebutuhan Masyarakat dengan lebih baik	10	30
12	Definisi <i>Capacity Building</i> dalam konteks tata kelola pemerintahan	18	30
13	Mengapa <i>Capacity Building</i> penting dalam tata kelola pemerintahan	20	30
14	Tujuan utama dari program <i>Capacity Building</i> dalam tata kelola pemerintahan	19	29
15	Metode yang digunakan dalam <i>capacity building</i> untuk meningkatkan kemampuan individu	14	29
16	Kontribusi <i>Capacity Building</i> pada pemberdayaan Masyarakat dalam tata kelola pemerintahan	17	30

Berdasarkan dari hasil ceramah dan diskusi yang dilakukan dengan pemerintah desa Margomulyo, Ibu-ibu PKK, dan tokoh adat Masyarakat Samin menunjukkan bahwa antusiasme mereka dalam mendengarkan ceramah dan diskusi menunjukkan adanya kemauan untuk memajukan kapasitas dan potensi yang dimiliki baik itu untuk individu sendiri dan kemajuan untuk desa. Peserta ceramah banyak menghubungkan penerapan *co-production* dan *capacity building* untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan perangkat desa dalam menjalankan pemerintahan, serta mengaitkannya untuk memajukan potensi desa Margomulyo menjadi desa wisata. Hasil temuan selama melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat ini menunjukkan bahwa Desa Margomulyo memiliki berbagai macam potensi desa, mulai dari budaya dengan adanya Masyarakat Samin yang memiliki adat dan kesenian yang unik, serta adanya potensi wisata alam dan rekreasi yang

ada di Taman Kemiri Sunan. Pengembangan potensi tersebut masih belum optimal dan banyak kendala di dalamnya.

Berdasarkan hasil temuan yang ada, pemerintah dan masyarakat Desa Margomulyo memiliki kendala dalam mengembangkan potensi desa menjadi desa wisata. Keunikan dari Desa Margomulyo adalah dengan adanya ajaran Saminisme oleh Masyarakat Samin yang terletak di Dusun Jepang. Ajaran Saminisme tersebut diturunkan dari generasi ke generasi hingga saat ini dan dikenal dengan Sedulur Sikep. Tidak hanya ajaran Sedulur Sikep saja yang menjadi keunikan dari Masyarakat Samin, hasil budaya dan kesenian masyarakat ini menjadi ikon desa, seperti: udeng dan selendang motif Sewu Obor yang menjadi khas Masyarakat Samin; bangunan rumah Srotong; kopi dan hasil umbi-umbian. Tokoh adat Masyarakat Samin (Bambang) terus melakukan upaya untuk mengembangkan potensi masyarakat Samin dengan belajar menghasilkan kerajinan baru berupa batik Ecoprint. Budaya dan kerajinan pada masyarakat Samin belum mampu membantu kehidupan perekonomian masyarakat setempat, permasalahan muncul dari minimnya dukungan dan perhatian pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi desa, serta minimnya minat pemuda untuk melestarikan budaya dan memilih merantau keluar. Selain itu, produk khas Samin seperti udeng, selendang, batik, dan kopi sulit untuk dipasarkan luar karena terkendala *platform* penjualan dan bingungnya mencari target pasar yang pas.



Gambar 4. *Udeng Sewu Obor khas Samin.*

Potensi lain yang dimiliki oleh Desa Margomulyo adalah adanya Taman Kemiri Sunan. Taman Kemiri Sunan merupakan perkebunan Kemiri Sunan yang di dalamnya oleh pemerintah desa sebelumnya diubah menjadi taman wisata dan rekreasi. Taman Kemiri Sunan menjadi berisi berbagai wahana rekreasi dan bermain untuk masyarakat yang berisikan berbagai permainan. Selain itu juga terdapat kolam renang anak dan dewasa didalamnya. Pengoperasian Taman Kemiri Sunan berjalan dengan baik selama dua tahun dengan menarik tiket masuk pengunjung anak-anak dan dewasa yang bermain. Pendapatan tiket tersebut akan masuk ke kas desa untuk pemeliharaan tempat wisata. Namun, berdasarkan hasil temuan Taman Kemiri Sunan terbengkalai karena kurangnya manajemen pemeliharaan tempat dan minimnya anggaran yang masuk untuk merawat tempat tersebut.



Gambar 5. Kondisi Taman Kemiri Sunan.

Melihat hasil analisis situasi dan permasalahan yang ada, kegiatan pengabdian masyarakat ini berupaya untuk membantu mewujudkan Desa Margomulyo sebagai wisata yang *Smart* berbasis *local wisdom* yang dimilikinya, yaitu budaya dan kerajinan masyarakat Samin, serta wisata hiburan dan rekreasi yang ada di Taman Kemiri Sunan. Untuk mewujudkan hal tersebut, dalam pelaksanaan sosialisasi *co-production* dan pengembangan kapasitas, tim pengabdian masyarakat mengenalkan prototipe aplikasi SAMINKU yang dapat membantu masyarakat Desa Margomulyo untuk menjadi Desa Wisata Smart.

Aplikasi Saminku dapat menjadi solusi bagi Pemerintah Desa Margomulyo mengintegrasikan pelayanan publik di desa tersebut, serta dapat menjadi sarana masyarakat untuk menjual produk dan hasil UMKM setempat. Selain itu, dengan adanya aplikasi ini membantu mewujudkan Desa Margomulyo sebagai desa wisata, Masyarakat atau pengunjung dapat mendapatkan informasi atau melakukan reservasi wisata ke Taman Kemiri Sunan atau mempelajari budaya Samin di Dusun Jepang.



Gambar 6. Prototipe aplikasi SAMINKU.

Penyampaian prototipe aplikasi SAMINKU disambut sangat baik oleh pemerintah desa setempat dan tokoh masyarakat Samin. Prototipe aplikasi ini berisikan gambaran yang dapat memudahkan pengguna untuk mendapatkan informasi terkait UMKM, berita yang

berkaitan dengan Desa Margomulyo dan Masyarakat Samin. Dalam prototipe aplikasi tersebut berisi berbagai fitur yang dapat mempermudah pengguna jika ingin membeli produk UMKM, atau melakukan reservasi ke tempat wisata yang ada. Selain itu, adanya aplikasi *mobile* diharapkan dapat mempermudah dan meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Hasil lain pelaksanaan pengabdian masyarakat ini ialah revitalisasi website Desa Margomulyo yang dapat diakses di <https://margomulyo-bjn.desa.id/>.

PENUTUP

Simpulan. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang telah diselenggarakan ini termasuk berhasil karena sesuai dengan kebutuhan pemerintah dan masyarakat Desa Margomulyo. Sosialisasi dan ceramah mengenai *co-production* dan *capacity building* menjadi bahan tambahan pengembangan pengetahuan dan kapasitas bagi pemerintah desa. Namun dalam pengembangan potensi desanya, Desa Margomulyo masih kurang dalam mengembangkan potensi kearifan lokal berupa adat, budaya, dan kesenian Masyarakat Samin yang menjadi ciri khas desa tersebut, dan kurang dalam mengembangkan potensi wisata rekreasinya berupa Taman Kemiri Sunan. Kurangnya pengembangan sektor pariwisata tersebut didasarkan pada kurangnya kapasitas kemampuan sumber daya manusianya, yakni pemerintah dan masyarakat, dalam melakukan *branding*, pengembangan, dan pemeliharaan pada objek wisata dan objek budaya serta kearifan lokal.

Saran. Berdasarkan hasil kesimpulan yang didapat dari hasil pengabdian masyarakat, terdapat beberapa saran yang dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas desa kedepannya, yaitu: 1) Perlu adanya pelatihan dan pembinaan lebih lanjut oleh pemerintah daerah atau dinas terkait program pengembangan kapasitas pemerintah desa atau masyarakat yang lebih mendalam, detail, dan menyeluruh; 2) Perlu adanya peran *stakeholder* atau pemangku kepentingan lainnya untuk mewujudkan Smart Desa Wisata. Peran *stakeholder* lain dapat membantu memberikan dukungan finansial, pemberdayaan lokal, membantu melakukan pemeliharaan budaya dan lingkungan, membantu mengembangkan produk dan layanan, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan membantu dalam manajemen pengelolaan risiko.

DAFTAR PUSTAKA

- Batubara, A. H. (2006). Konsep Good Governance Dalam Konsep Otonomi Daerah. *Analisis Administrasi Dan Kebijakan*, 3, 1–6.
- Bhargava, V. (2015) “Engaging Citizens and Civil Society to Promote Good Governance and Development Effectiveness,” *ADB Governance Brief*, 23(23), pp. 1–8. Available at: www.adb.org/.
- Chambers, J. M., Wyborn, C., Ryan, M. E., Reid, R. S., Riechers, M., Serban, A., Bennett, N. J., Cvitanovic, C., Fernández-Giménez, M. E., Galvin, K. A., Goldstein, B. E., Klenk, N. L., Tengö, M., Brennan, R., Cockburn, J. J., Hill, R., Munera, C., Nel, J. L., Österblom, H., ... Pickering, T. (2021). Six modes of co-production for sustainability. *Nature Sustainability*, 4(11), 983–996. <https://doi.org/10.1038/s41893-021-00755-x>

- Chohan, S. K. (2020). *New Public Management and its Impact on the Voluntary Sector : a case study of youth unemployment services in Coventry.*
- Farr, M. (2018). Power dynamics and collaborative mechanisms in co-production and co-design processes. *Critical Social Policy*, 38(4), 623–644. <https://doi.org/10.1177/0261018317747444>
- Fung, A. (2015). Putting the Public Back into Governance: The Challenges of Citizen Participation and Its Future. *Public Administration Review*, 75(4), 513–522. <https://doi.org/10.1111/puar.12361>
- Heaton, J., Day, J., & Britten, N. (2016). Collaborative research and the co-production of knowledge for practice: An illustrative case study. *Implementation Science*, 11(1), 1–10. <https://doi.org/10.1186/s13012-016-0383-9>
- Kardos, M. (2012). The Reflection of Good Governance in Sustainable Development Strategies. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 58, 1166–1173. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.09.1098>
- Lewis A, King T, Herbert L, Repper J. (2017). Co-production – Sharing Our Experiences Reflecting on Our Learning. ImROC. Available at <https://imroc.org/resources/13-co-productions-sharing-experiences-reflecting-learning/>. Accessed July 25, 2018
- Loeffler, E., & Bovaird, T. (2021). User and Community Co-production of Public Value BT - The Palgrave Handbook of Co-Production of Public Services and Outcomes. In E. Loeffler & T. Bovaird (Eds.), *The Palgrave Handbook of Co-Production of Public Services and Outcomes* (pp. 31–57). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-53705-0_2
- Marshall C, Zambeaux A, Ainley E, McNally D, King J, Wolfenden L, Lee H. (2019) NHS England Always Events® program: Developing a national model for co-production. *Patient Experience Journal*. 2019; 6(1):154-165. doi: 10.35680/2372-0247.1340.
- Marzuki (2016) “Reformasi Birokrasi Dan Inovasi Pemberdayaan Masyarakat,” *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 42(2), p. 11. doi: 10.33701/jipwp.v42i2.146.
- Oroh, G. S. (2014). Peranan Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pertanian di Desa Tumaratas Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 1(5).
- Osborne, S. P., Radnor, Z., & Strokosch, K. (2016). Co-Production and the Co-Creation of Value in Public Services: A suitable case for treatment? *Public Management Review*, 18(5), 639–653. <https://doi.org/10.1080/14719037.2015.1111927>
- Ostrom, A. L., Parasuraman, A., Bowen, D. E., Patrício, L., & Voss, C. A. (2015). Service Research Priorities in a Rapidly Changing Context. *Journal of Service Research*, 18(2), 127–159. <https://doi.org/10.1177/1094670515576315>
- Pettican, A., Goodman, B., Bryant, W., Beresford, P., Freeman, P., Gladwell, V.,

Kilbride, C., & Speed, E. (2023). Doing together: reflections on facilitating the co-production of participatory action research with marginalised populations. *Qualitative Research in Sport, Exercise and Health*, 15(2), 202–219. <https://doi.org/10.1080/2159676X.2022.2146164>

Rakhmat. 2018. *Administrasi dan Akuntabilitas Publik*. Yogyakarta: Andi

Saputro, R. H. and Safriansyah (2021) “Tantangan Sistem Informasi Berbasis Pelayanan Publik di Era Revolusi Industri 4.0,” *Sawala : Jurnal Administrasi Negara*, 9(1), pp. 89–101. doi: 10.30656/sawala.v9i1.2943

Setyadiharja, R., Kurniasih, D., Nursnaeny, P. S., & Nengsih, N. S. (2017). Good Governance vs Sound Governance: A Comparative Theoretical Analysis. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR)*, 163. <https://doi.org/10.2991/icodag-17.2017.19>

Turnhout, E., Metze, T., Wyborn, C., Klenk, N., & Louder, E. (2020). The politics of coproduction: participation, power, and transformation. *Advancing the Science of Actionable Knowledge for Sustainability*, 42, 15–21. <https://doi.org/10.1016/j.cosust.2019.11.009>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Van Eijk, C., & Steen, T. (2015). Why engage in co-production of public services? Mixing theory and empirical evidence. *International Review of Administrative Sciences*, 82(1), 28–46. <https://doi.org/10.1177/0020852314566007>

Verschuere, B., Brandsen, T., & Pestoff, V. (2012). Co-production: The State of the Art in Research and the Future Agenda. *VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations*, 23(4), 1083–1101. <https://doi.org/10.1007/s11266-012-9307-8>